Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 3, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

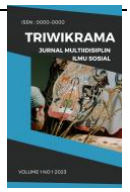

IMPLEMENTASI PROGRAM AIR BERSIH MASYARAKAT DESA PANGIAN KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ririn Agansi[1], Joyce Jacinta Rares[2], Helly Febrina Kolondam[3]
[123] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

ririnagansi770@gmail.com
joy.rares09@gmail.com
hellykolondam@unsrat.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu

ABSTRAK

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat vital dalam menunjang kehidupan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Program Air Bersih masyarakat melalui PAMSIMAS di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (Kepala Desa, pengurus air bersih, dan masyarakat), observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program air bersih di Desa Pangian belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif akibat minimnya sosialisasi berkala, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial serta kondisi sarana prasarana perpipaan yang rusak, disposisi pelaksana yang belum maksimal dalam responsivitas, serta struktur birokrasi yang belum tertata akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis. Kesimpulannya, diperlukan pembenahan struktur birokrasi, penyusunan SOP, peningkatan kapasitas pengelola, dan penguatan koordinasi antarpihak agar pelayanan air bersih berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Air Bersih, PAMSIMAS, Pelayanan Publik, Desa Pangian

ABSTRACT

Clean water is an essential basic human need to support life, health, and community welfare. This study aims to analyze and describe the implementation of the community clean water program through PAMSIMAS in Pangian Village, East Passi District, Bolaang Mongondow Regency. The research method employed is a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with 10 informants (Village Head, water program managers, and community members), field observation, and documentation. Data analysis refers to George C. Edward III's policy implementation framework, covering four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of the clean water program in Pangian Village has not operated optimally. This is caused by ineffective communication due to a lack of continuous socialization, limited human and financial resources alongside damaged piping infrastructure, suboptimal implementer disposition in terms of responsiveness, and an unstructured bureaucratic framework due to the absence of written Standard Operating Procedures (SOPs). In conclusion, bureaucratic structuring, SOP formulation, manager capacity building, and inter-stakeholder coordination

*Corresponding author
E-mail addresses: ririnagansi770@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 3,Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

strengthening are urgently needed to ensure sustainable and effective clean water service delivery.

***Keywords**: Policy Implementation, Clean Water Program, PAMSIMAS, Public Service, Pangian Village*

1. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat fundamental dan tidak dapat tergantikan oleh sumber daya lainnya. Air bersih digunakan untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci, serta menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan air bersih yang layak dan memadai menjadi faktor penentu dalam menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kesejahteraan umum. Oleh karena itu, akses terhadap air bersih dipandang sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengamanatkan bahwa sumber daya air harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air bersih yang layak dan berkelanjutan.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2022), keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk berdampak langsung pada peningkatan risiko penularan berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Kondisi ini secara bertahap menurunkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat akses masyarakat terhadap air minum layak telah mencapai 90,75%, namun akses masyarakat terhadap air minum yang benar-benar aman baru menyentuh angka 12,2%. Kesenjangan angka ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur dasar telah menjangkau sebagian besar wilayah, kualitas dan keamanan pasokan air yang diterima oleh masyarakat masih membutuhkan perhatian serius, khususnya di wilayah perdesaan yang kerap mengalami keterbatasan infrastruktur, anggaran, dan kapasitas sumber daya manusia.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 merumuskan kebijakan nasional melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan dukungan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan berdasarkan landasan kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. PAMSIMAS dirancang dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community-based approach*), di mana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan penanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan fisik, hingga pengoperasian dan pemeliharaan sarana air bersih.

Secara konseptual, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Sinambela, 2008; Bakar, 2021). Dalam konteks penyediaan air bersih di perdesaan, pemerintah desa berkedudukan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi secara adil, merata, dan proporsional. Namun, dalam kenyataannya, keberhasilan penyediaan air bersih tidak hanya ditentukan oleh tersedianya alokasi fisik atau bantuan infrastruktur, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dan program tersebut diimplementasikan di tingkat lokal.

Desa Pangian yang terletak di Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan salah satu wilayah yang memperoleh alokasi Program PAMSIMAS. Meskipun Desa Pangian dikaruniai potensi sumber daya air alami yang relatif melimpah, pemanfaatan dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, No, 3 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pengelolaannya menghadapi hambatan teknis maupun manajerial. Berdasarkan data awal, terdapat 404 Kepala Keluarga (KK) di Desa Pangian, di mana 387 KK di antaranya tercatat sebagai penerima layanan air bersih. Namun, akibat keterbatasan debit dan kendala jaringan distribusi, pelayanan air tidak dapat mengalir secara konstan setiap hari ke seluruh rumah warga. Hanya sekitar 193 KK yang dapat menerima distribusi air bersih dalam satu hari, sementara warga lainnya harus menunggu giliran pada hari berikutnya. Fenomena penjadwalan gilir air ini menciptakan permasalahan tersendiri terkait kepuasan masyarakat, efektivitas pelayanan, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas.

Perspektif teori administrasi publik menguraikan bahwa implementasi kebijakan adalah proses tindakan administrasi dan politik untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik ke dalam praktik operasional (Dunn, 2003; Suwitri, 2008; Waluyo, 2007). Salah satu model teoritis yang sangat relevan dan komprehensif dalam mengedah keberhasilan implementasi kebijakan dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel kunci yang saling berinteraksi, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan memberikan gambaran mengenai kompleksitas implementasi program penyediaan air bersih dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Langitan, Laloma, dan Dengo (2020) dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan sarana air bersih di Desa Insil, Kecamatan Passi Timur, menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal akibat minimnya komunikasi, terbatasnya dukungan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Lomboan, Rares, dan Kiyai (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan infrastruktur dasar sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan anggaran. Ponamon, Lengkong, dan Palar (2021) menggarisbawahi pentingnya kejelasan struktur birokrasi serta disposisi pelaksana dalam menjamin ketercapaian sasaran program pemerintah. Selain itu, Kontu, Kiyai, dan Tampongangoy (2021) serta Bakulu, Pangkey, dan Kolondam (2021) menegaskan bahwa konsistensi aturan dan efektivitas pengawasan merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial.

Berdasarkan fenomena empiris dan kajian teoritis di atas, terdapat celah penelitian (*research gap)* mengenai bagaimana interaksi keempat variabel model Edward III memengaruhi keberhasilan program air bersih pada desa dengan sistem distribusi bergilir seperti Desa Pangian. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai Implementasi Program Air Bersih Masyarakat di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung serta memberikan formulasi solusi yang konstruktif bagi peningkatan pelayanan air bersih di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai fenomena implementasi program air bersih di lokasi penelitian (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi program air bersih masyarakat dengan mengacu pada empat indikator utama teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

*Corresponding author
E-mail addresses: ririnagansi770@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 3,Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Penentuan informan dilakukan secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui, memiliki wewenang, dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Pangian selaku pembuat kebijakan dan penanggung jawab tingkat desa, Pengurus/Petugas Pengelola Air Bersih selaku pelaksana teknis operasional program, Masyarakat penerima manfaat selaku kelompok sasaran dan pengguna layanan.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif pasif terhadap sarana fisik pamsimas serta proses pengaliran air. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, laporan program PAMSIMAS, data kependudukan BPS, serta literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama yaitu wawancara Mendalam: Menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi dari Kepala Desa, pengurus air bersih, dan warga masyarakat. Observasi Lapangan: Mengamati secara langsung kondisi fisik bak penampungan air (reservoir), jaringan perpipaan, kran distribusi, serta pola penggunaan air oleh warga. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen berupa profil desa, skep kepengurusan air bersih, foto kondisi fasilitas fisik PAMSIMAS 2021, serta arsip administrasi permohonan penelitian.

Teknik analisis data mengikut tahapan analisis data kualitatif model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020), yang terdiri dari: Reduksi Data (Data Reduction): Meresume, menggolongkan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data yang relevan dengan indikator Edward III, serta membuang data yang tidak diperlukan. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi deskriptif, tabel matriks informan, serta bagan alur hubungan antarvariabel. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Merumuskan kesimpulan akhir berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui pengujian keabsahan data.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Kepala Desa, pengurus, dan warga) serta triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan dan bukti dokumentasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Program Air Bersih Desa Pangian

Desa Pangian merupakan salah satu desa di Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah desa ini memiliki topografi yang sebagian besar berbukit-bukit dengan pola permukiman penduduk yang tersebar. Secara sosial-ekonomi, mayoritas penduduk Desa Pangian bermata pencaharian di sektor pertanian dan usaha skala mikro dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Kondisi sosial ekonomi ini berdampak pada terbatasnya daya beli serta kapasitas swadaya masyarakat dalam mendukung pembiayaan fasilitas umum.

Program Air Bersih yang berjalan di Desa Pangian diselenggarakan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang telah dibangun secara bertahap, dengan intervensi fisik terakhir tercatat pada tahun 2021. Berdasarkan data kependudukan desa, total keseluruhan KK di Desa Pangian sebanyak 404 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 387 KK tercatat sebagai penerima manfaat layanan air bersih. Namun, dikarenakan keterbatasan kapasitas debit air pada bak penampungan utama dan jaringan perpipaan yang sebagian mengalami penyumbatan, sistem pembagian air diberlakukan secara berselang-seling (sistem gilir hari). Dalam satu hari pengaliran, air bersih hanya dapat didistribusikan kepada 193 KK, sedangkan 194 KK sisanya baru memperoleh alokasi air pada hari berikutnya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, No, 3 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Analisis Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori George C. Edward III

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Air Bersih di Desa Pangian, digunakan pendekatan empat variabel utama model George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Uraian komprehensif dari hasil penelitian dan pembahasannya disajikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan syarat mutlak agar para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta kelompok sasaran (target group) memahami hak, kewajiban, dan tujuan dari program tersebut. Menurut Edward III, indikator komunikasi yang efektif diukur melalui tiga aspek utama: transmisi (*penyampaian informasi*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa Pangian (GW), penyampaian informasi awal mengenai Program Air Bersih PAMSIMAS telah dilaksanakan melalui wadah musyawarah desa dan rapat RT/RW. Pemerintah desa berupaya menginformasikan tujuan program, rencana pembangunan fisik, serta pentingnya partisipasi warga. Informasi teknis juga disampaikan secara insidental apabila terjadi gangguan pengaliran atau kerusakan pipa utama.

Namun demikian, temuan di lapangan dari wawancara bersama pengurus air bersih dan warga masyarakat menunjukkan bahwa transmisi informasi tidak berjalan secara berkelanjutan. Sosialisasi berkala mengenai tata cara pengelolaan, mekanisme penentuan iuran operasional, serta kewajiban warga dalam menjaga fasilitas sangat minim. Sebagian besar warga mengaku hanya mendapatkan penjelasan saat program pertama kali diluncurkan pada tahun 2021. Akibatnya, timbul kebingungan di tingkat masyarakat mengenai alasan pengaliran air harus digilir dua hari sekali serta ke mana dana iuran masyarakat dialokasikan.

Dilihat dari aspek kejelasan (*clarity*), informasi yang disampaikan oleh pengelola sering kali bersifat informal dan lisan tanpa didukung oleh edaran resmi tertulis dari desa. Hal ini memicu distorsi komunikasi dan kesalahpahaman antara pengelola dan warga. Dari aspek konsistensi, penyampaian aturan iuran dan sanksi keterlambatan pembayaran tidak konsisten, di mana penegakan aturan acap kali berubah-ubah tergantung situasi lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Langitan, Laloma, dan Dengo (2020) di Desa Insil, yang menegaskan bahwa komunikasi yang bersifat parsial dan kurang transparan menjadi penghambat utama dalam penyediaan sarana air bersih perdesaan. Ketiadaan saluran komunikasi timbal balik yang efektif menyebabkan aspirasi dan keluhan warga tidak tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan variabel krusial yang menentukan apakah suatu program dapat dioperasikan secara berdaya guna. Keberadaan kebijakan yang ideal tidak akan memberi dampak nyata apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Variabel sumber daya mencakup sumber daya manusia (SDM), sumber daya finansial, sarana dan prasarana, serta kewenangan.

Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pengurus air bersih di Desa Pangian saat ini hanya berjumlah 3 orang)l. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 387 KK yang tersebar di wilayah perbukitan, rasio petugas dengan beban pelayanan tergolong sangat tidak seimbang. Keterbatasan personil ini diperparah oleh kurangnya kemampuan teknis (*technical skills*) pengurus dalam bidang pemeliharaan perpipaan dan penanganan kebocoran sistem. Pengurus bekerja secara sukarela tanpa dibekali pelatihan teknis yang memadai dari dinas terkait maupun pemerintah desa.

*Corresponding author
E-mail addresses: ririnagansi770@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 3,Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kedua, Sumber Daya Finansial. Anggaran operasional dan pemeliharaan program air bersih di Desa Pangian sepenuhnya mengandalkan iuran swadaya masyarakat. Namun, karena tingkat pendapatan warga tergolong rendah dan kesadaran membayar iuran belum merata, penerimaan kas pengelola sangat minim. Dari wawancara dengan informan, diketahui bahwa iuran terkumpul sering kali tidak mencukupi untuk membeli perlengkapan pipa baru, kran pengganti, maupun biaya transportasi perawatan ke sumber mata air utama. Pemerintah desa juga belum mengalokasikan persentase khusus yang signifikan dari Dana Desa (DD) untuk perawatan berkala PAMSIMAS.

Ketiga, Sarana dan Prasarana. Observasi langsung di lapangan mengindikasikan bahwa fasilitas PAMSIMAS yang dibangun tahun 2021 mengalami penurunan kualitas secara fisik. Terlihat adanya sedimentasi lumpur pada bak penampungan, kebocoran pada pipa-pipa utama penyalur, serta kerusakan valve pengatur giliran air. Kerusakan fisik ini menjadi penyebab utama berkurangnya volume air yang sampai ke rumah warga sehingga pengaliran air terpaksa digilir.

Keempat, Kewenangan. Pengelola air bersih tidak memiliki kewenangan ketat yang dilindungi oleh Peraturan Desa (Perdes) untuk menindak warga yang melakukan penyambungan liar atau menunggak iuran bulanan. Hal ini membuat pelaksana tidak berkutik dalam menegakkan kedisiplinan penggunaan air. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Lomboan, Rares, dan Kiyai (2021), yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dan fisik prasarana merupakan penghambat utama efektivitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan responsivitas para pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Komitmen yang kuat dari implementator mampu mengatasi keterbatasan sarana, sebaliknya disposisi yang lemah akan menghambat program meskipun anggaran memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola air bersih pada dasarnya memiliki iktikad baik dan komitmen moral untuk melayani warga. Mereka bersedia meluangkan waktu di luar jam kerja utama untuk memeriksa bak penampungan dan memperbaiki pipa yang terputus. Kepala Desa juga menunjukkan sikap mendukung terhadap keberadaan program air bersih sebagai bagian dari pelayanan publik desa.

Akan tetapi, responsivitas pelaksana terhadap keluhan warga masih tergolong lambat. Ketika warga melaporkan air mati atau keruh, perbaikan sering kali memerlukan waktu beberapa hari. Keterlambatan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kesengajaan, melainkan gabungan dari keterbatasan alat, dana, dan ketidakpastian pembagian tugas di antara pengurus. Di sisi lain, disposisi kelompok sasaran (masyarakat) juga terbelah. Sebagian masyarakat menunjukkan kesadaran tinggi dengan rutin membayar iuran dan bergotong-royong membersihkan lingkungan sekitar sumber air. Namun, sebagian warga lainnya bersikap apatis, enggan membayar iuran dengan alasan air tidak mengalir setiap hari, serta kurang peduli terhadap kelestarian sarana umum.

Kondisi ini selaras dengan teori Edwards III dan temuan Ponamon, Lengkong, dan Palar (2021), yang menegaskan bahwa disposisi pelaksana dan penerima manfaat yang belum seragam dapat menciptakan hambatan psikologis dan operasional dalam keberlanjutan pelayanan publik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi mencakup dua aspek mendasar: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi (pembagian tugas serta tata hubungan kerja antarlembaga). Birokrasi yang rumit atau sebaliknya terlalu longgar tanpa petunjuk kerja tertulis akan mengganggu efisiensi implementasi program.

Temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Air Bersih di Desa Pangian sama sekali belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, No, 3 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dibuat secara resmi dan tertulis. Seluruh aktivitas operasional mulai dari jadwal pembersihan bak reservoir, penentuan giliran pasokan air per wilayah, mekanisme penagihan iuran, hingga penanganan kerusakan teknis dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan (tradisi lisan) dan kesepakatan tidak tertulis.

Ketiadaan SOP ini menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab di antara pengurus air. Ketika timbul masalah teknis di lapangan, pengurus saling menanti atau bingung mengenai siapa yang berkewajiban mengambil keputusan. Selain itu, garis koordinasi antara Pengelola Air Bersih, Kepala Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) belum terstruktur secara sistematis. Pelaporan keuangan dan kinerja operasional dilakukan secara informal tanpa pertanggungjawaban periodik yang transparan.

Temuan ini sangat sejalan dengan penelitian Langitan et al. (2020) dan Kontu et al. (2021), yang menyatakan bahwa ketiadaan tata kelola birokrasi yang tertata dan formalisasi SOP menjadi faktor kunci yang menyebabkan program-program pelayanan publik di tingkat desa tidak berjalan secara optimal dan rawan mengalami kegagalan keberlanjutan.

Pembahasan Sintesis dan Keterkaitan Antarvariabel

Berdasarkan analisis terhadap keempat variabel George C. Edward III di atas, terlihat secara jelas bahwa ketidakoptimalan implementasi Program Air Bersih di Desa Pangian merupakan wujud dari interaksi sistemik antarvariabel. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan lemahnya kesadaran warga dalam membayar iuran. Pembayaran iuran yang minim berdampak langsung pada kelangkaan sumber daya finansial dan ketidakmampuan merawat sarana fisik perpipaan. Sarana perpipaan yang rusak memicu berkurangnya debit air, sehingga memaksa timbulnya sistem pengaliran bergilir (193 KK per hari dari total 387 KK penerima). Kondisi pengaliran yang tidak konstan ini kemudian memperlemah disposisi warga untuk berpartisipasi, sementara ketiadaan SOP dan struktur birokrasi yang jelas membuat pelaksana kesulitan merumuskan tindakan korektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Air Bersih Masyarakat di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh empat variabel utama dalam teori George C. Edward III yang saling berkaitan:

1. Komunikasi belum efektif, ditandai oleh kurangnya sosialisasi berkala, minimnya kejelasan informasi aturan iuran dan giliran air, serta belum adanya saluran komunikasi timbal balik yang intensif antara pengelola dan warga.
2. Sumber daya masih sangat terbatas, baik dari segi keterbatasan jumlah dan kemampuan teknis SDM pengelola, minimnya anggaran operasional swadaya, penurunan kondisi fisik jaringan perpipaan dan bak penampungan PAMSIMAS 2021, serta ketiadaan regulasi kewenangan tegas.
3. Disposisi pelaksana cukup baik secara komitmen moral namun masih lambat dalam responsivitas penanganan keluhan warga, sementara kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana serta membayar iuran masih bervariasi.
4. Struktur birokrasi belum tertata dengan baik dikarenakan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, pembagian tugas pengurus yang belum formal, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan yang masih informal.

*Corresponding author
E-mail addresses: ririnagansi770@gmail.com

Saran

Guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Air Bersih di Desa Pangian, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi: Pemerintah Desa Pangian dan pengelola perlu menyelenggarakan sosialisasi berkala dan musyawarah transparan mengenai tata kelola air bersih, serta membuat papan informasi publik terkait keuangan dan jadwal pengaliran air.
2. Penguatan Sumber Daya dan Infrastruktur: Mengalokasikan sebagian Dana Desa (DD) untuk merehabilitasi jaringan perpipaan dan bak penampungan PAMSIMAS 2021 yang rusak, serta mengikutsertakan pengurus air dalam pelatihan teknis perawatan sarana air minum.
3. Penguatan Disposisi dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan responsivitas pengelola dalam menangani keluhan warga serta menumbuhkan budaya gotong-royong warga melalui program edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Pembenahan Struktur Birokrasi dan Perdes: Pemerintah Desa Pangian bersama BPD perlu menyusun Standar Prosedur (SOP) tertulis mengenai pengelolaan air bersih serta merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur hak, kewajiban, tarif iuran, dan sanksi bagi pengguna layanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bakar, A. (2021). Hakekat Pelayanan Publik. Jurnal Perspektif, 13(2), 81–87.

Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Administrasi Publik, 7(101).

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra, Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.

Kontu, E., Kiyai, B., & Tampongangoy, D. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Picuan Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(107).

Langitan, C. P., Laloma, A., & Dengo, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana Air Bersih Kawasan Perdesaan Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 6(90).

Lomboan, M., Rares, J., & Kiyai, B. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 7(105).

Ponamon, S., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Program Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Administrasi Publik, 7(104).

Sinambela, L. P. (2008). Dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasinya.

Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.